

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 919 / B.XII /HK/2014
 TANGGAL : 31 Desember 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

1. Nama Organisasi : Pemerintah Provinsi Lampung
 2. Visi : Lampung Maju Dan Sejahtera 2019
 3. Misi : 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.
 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.
 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Kehidupan beragama.
 4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Daerah	1. Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 4. PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 5. PDRB per Kapita (harga berlaku) (Juta rupiah) 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Pertanian, Tanaman dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Bakorluh, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Biro Administrasi Pembangunan, Badan Perwakilan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Pertambangan dan Energi	

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		
		3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		
		4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi;	1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor non migas		
		5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah;	1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah UMKM		
		6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku.		
		7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	1. Jumlah Wisatawan Nusantara. 2. Jumlah Wisatawan Mancanegara.		
		8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	Pertumbuhan PAD		
2.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah	9. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;	Kemantapan Jalan Provinsi	Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan Dan Pemukiman, Pelaksana BPBD, Dinas Pertambangan dan Energi	
		10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;	Tingkat Kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penggunaan ruang		

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		11. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;	1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara 2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun		
		12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);	1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak. 2. Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh 3. Tingkat Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan Permukiman yang Sehat (Sanitasi Layak, Drainase, Persampahan, Air Limbah) 4. Tingkat Rumah Layak Huni		
		13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	1. Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan. 2. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga.		
3.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Pendidikan Masyarakat	14. Meningkatnya Angka Melek Huruf. 15. Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun.	Angka Melek Huruf 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A. 2. APK SMP/MTs/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. APM SMP/MTs/ Paket B 5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka Melanjutkan SMP – SMA 8. Angka Melanjutkan SMA – PT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Diklat, Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa, Sekretariat KORPRI, Badan Perwakilan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Bina Mental, Biro Bina Sosial, Balitbangnovda dan Biro Umum	

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		16. Meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.	1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket C		
4.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Derajat Kesehatan Masyarakat	17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu (AKI) 4. Prevalensi Balita Gizi Kurang (<i>underweight</i>) 5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / <i>case notification rate</i>) 6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) 7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan DBD		
5.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara 2. Jumlah pengunjung museum 3. Jumlah sanggar kesenian		
6.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat	19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial.	1. Persentase penduduk miskin 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa)		
7.	Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Kerja	20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja	1. Rasio ketergantungan. 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
8.	Mewujudkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi	1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung 2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru		

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
9.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22. Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender	1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplemen tasikan anggaran responsif gender		
			2. Jumlah Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui ekonomi kreatif		
		23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah Kab/Kota layak anak se- Provinsi Lampung		
			2. Penanganan kasus perempuan dan anak		
10.	Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang Berprestasi dibidang Olahraga	24. Mengingkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat	1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional		
			2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan		
11.	Mewujudkan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang Toleran	25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk		
12.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi	26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi	1. Jumlah rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) pembangunan daerah yang aplikatif		
			2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA		
13.	Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan Pembangunan	27. Penurunan Beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta konservasi SDA	1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kehutanan	
		28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Tingkat pencemaran air		

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Provinsi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis	Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove		
14.	Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat	30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dimasyarakat	1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan 2. Penyelesaian Kasus Tanah	Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan Umum, Kantor Satpol PP, Badan Perwakilan, Biro Organisasi, Biro Otonomi Daerah, Biro Keuangan, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Humas dan Protokol, Biro Umum, Biro Perekonomian, Biro Bina Sosial, Sekretariat DPRD, Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Dinas Kominfo, Sekretariat KPID, Dinas Pertanian TPH, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pendapatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Badan Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Umum, Dinas Pendidikan, RSUD, Dr.H.Abdul Moeloek, Kantor Sandi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Sosial, Sekretariat KORPRI, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, BPLHD, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Badan Litbangnovda,	
15.	Mengembangkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif	31. Meningkatnya Kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan Prima	1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		
		32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja pelayanan publik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah		
		33. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan pembinaan dan pengawasan		

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
16.	Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasi	34. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan	Biro Bina Mental, Badan PP dan PA, BPMPD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Diklat, BPBD, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Peternakan dan Keswan, Sekretariat BAKORLUH, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Badan Kesbangpol	
			2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)		
			3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat		
17.	Merealisasikan Pembangunan Politik	35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum	Indeks demokrasi		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO